

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep pembangunan terkhusus di negara Indonesia berkaitan erat dengan pola sistem politik dan administrasi negara yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena administrasi pembangunan merupakan administrasi negara yang memiliki peran sebagai agen perubahan yang bertujuan mencapai keberhasilan pembangunan di berbagai aspek (Weidner, dkk dalam Ibrahim, 2008:3). Hubungan korelasi ini dapat terlihat mulai dari bagaimana paradigma *old public administration* yang berkembang di negara Indonesia, dimana otoritas pemerintahan sangat melekat dan mendominasi proses pembangunan seperti pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada periode tersebut, pemerintah menjadi aktor utama pemegang kekuasaan yang mengikat serta bersifat memonopoli pembangunan. Akibatnya pola pemerintah bersifat sentralistik atau terdapat istilah Lorte & Klauss. Pada faktanya, menurut Tjokroamidjojo (1982: 19) suatu proses pembangunan akan mencapai kesuksesan jika dalam keberjalanannya melibatkan partisipasi rakyat dalam suatu negara.

Pembangunan desa merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya di perkotaan, desa juga memiliki potensi sumber dayanya yang melimpah. Pengalokasian sumber daya yang baik oleh pemerintah ataupun *stakeholders*, dapat meningkatkan perkembangan ekonomi dan menjadi inisiasi daerah lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai mata pencaharian utama di desa, petani juga berperan besar dalam meningkatkan

perekonomian. Sebagian besar petani, enggan untuk mencari pekerjaan baru di kota karena merasa telah berkomitmen untuk bertani serta sulit untuk beradaptasi di perkotaan dengan rata-rata pendidikan manusianya yang rendah.

Pengelolaan desa, baik infrastruktur, potensi, maupun perilaku masyarakat juga menjadi hal yang krusial dalam suatu upaya peningkatan taraf hidup untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, menyatakan bahwasannya tujuan adanya pembangunan dan perencanaan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan setiap masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sistem sarana dan prasarana, peningkatan potensi ekonomi lokal, serta pengalokasian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Program Pembangunan infrastruktur desa juga berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan primer, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi sumber daya ekonomi lokal dengan penyuluhan, serta pengalokasian sumber daya demi kelangsungan hidup masyarakat desa. Dalam mencapai tujuan pembangunannya, perlu adanya desentralisasi yang efektif dalam proses pembuatan keputusan. Upaya meningkatkan kesejahteraan warga desa dengan pemanfaatan alokasi dana desa diharapkan dapat bekerja secara efektif dalam memberikan dukungan pelaksanaan pembangunan partisipatif seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini bertanggung jawab untuk memastikan distribusi dana desa terlaksana dengan maksimal dan mencapai tujuan program yang ditetapkan. Salah satu pola pendekatan pengembangan potensi masyarakat yang paling efektif

dalam upaya pemenuhan keterlibatan masyarakat adalah mendorong dan merangsang masyarakat agar memiliki kapabilitas dalam mengidentifikasi keinginan serta kebutuhan bekerja dengan kooperatif dan membangkitkan jiwa gotong royong setiap individu. Selain itu, pemerintah daerah juga juga harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam pengalokasian anggaran.

Peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membentuk pola kerja sama yang seimbang sehingga terwujudnya program yang solutif dan memberikan manfaat terhadap masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan “Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.”

Peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur desa merupakan realisasi dari konsep *good governance*. Pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah harus mampu bersinergi dalam melakukan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut dapat diimplementasikan dari tingkat terendah, yaitu desa. Sejumlah wilayah terutama di pedesaan Provinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu wilayah dengan banyak desa yang mengalami kekeringan. Sebagai wilayah rawan kekeringan, Kecamatan Getasan telah

berupaya melakukan antisipasi dalam menghadapi kemarau panjang. Menurut data pantauan BMKG pada tahun 2021 tepatnya akhir Agustus, perkembangan musim kemarau tercatat bahwa 85,1% wilayah Indonesia mengalami kemarau panjang. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Tengah termasuk ke dalam wilayah HTH (Hari Tanpa Hujan).

Tingkat kebutuhan air untuk pengairan rata-rata per tahun sebanyak 19.636.378.014 m³/ tahun dengan sumsi perhitungan yang berdasar pada perencanaan kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga). Untuk mendukung tingkat ketanahan pangan, terdapat aktualisasi pengelolaan jaringan irigasi serta adanya pembangunan penampungan air seperti embung dan waduk. Wilayah Provinsi Jawa Tengah, memiliki total luas area Daerah Irigasi (DI) sebesar 953.804 ha, yang terbagi atas 33 DI kewenangan pusat dengan total luas mencapai 347.674 ha (36,45 persen), total 108 DI berada pada kewenangan provinsi dengan luas sebesar 86. 865 ha (9,11 persen) dan 11.401 DI yang berada dalam kewenangan Kabupaten/Kota dengan total seluas 519.265 ha (54,44 persen).

Tabel 1.1.

Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kewenangan Daerah Irigasi	Luas Area (ha)	% Dari Total Luas	Jumlah Daerah Irigasi
1.	Pusat	347.674	36,45%	33
2.	Provinsi	86.865	9,11%	108
3.	Kab/Kota	519. 265	54,44%	11.401
Total Jawa Tengah		953.804	100,00%	11.542

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

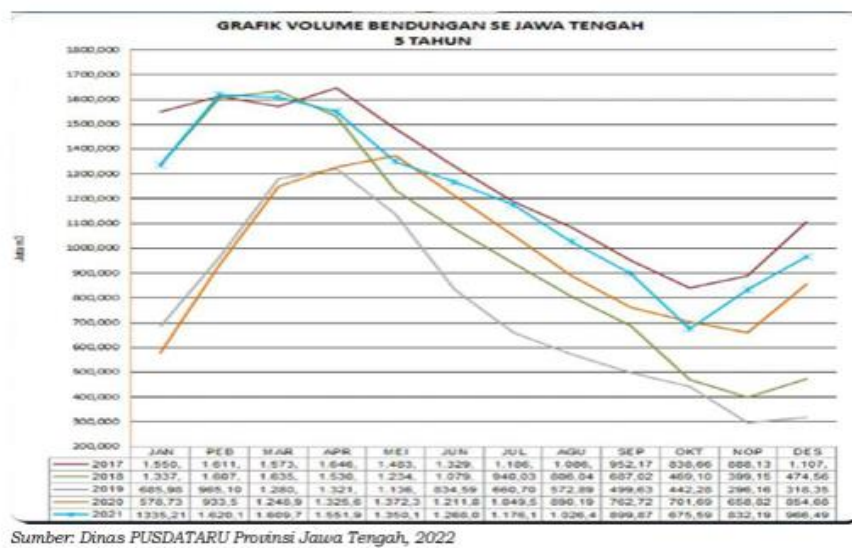
Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah secara signifikan berupaya melakukan pengelolaan sistem irigasi demi meningkatkan ketahanan pangan, aktivitas rumah tangga, pertanian, dan peternakan. Meskipun demikian, dalam jangka waktu tahun 2016 sampai tahun 2021 masih ditemukan permasalahan sistem irigasi yang dalam kondisi rusak yang berjumlah cukup besar. Maka dari itu, dibutuhkan semakin banyak inovasi untuk mengupayakan rehabilitasi dan pemeliharaan sistem irigasi kewenangan pemerintah provinsi.

Tabel 1.2.
Kondisi Fisik Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi
Tahun 2016-2021

Tahun	Kualitas Jaringan Irigasi								Total
	Baik		Ringan		Sedang		Berat		Luas
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	(Ha)
2016	1.730	6	67.754	73	17.044	19	337	2	86.865
2017	4.433	6	64.207	74	18.225	20	0	0	86.865
2018	4.941	7	63.349	75	18.575	18	0	0	86.865
2019	4.941	6	66.723	77	15.201	17	0	0	86.865
2020	4.333	5	67.178	77	15.354	18	0	0	86.865
2021	4.333	5	67.513	78	15.019	17	0	0	86.865

Sumber : PUSDATARU Jawa Tengah Tahun 2022

Berdasarkan data sebaran kondisi daerah irigasi tersebut, menunjukkan tingkat kualitas irigasi yang baik di 11 wilayah kabupaten dibawah 50 persen, 11 wilayah kabupaten antara 50-70 persen, dan total 10 kabupaten antara 70-95 persen. Pemerintah telah mengupayakan rehabilitasi sitem irigasi kewenangan provinsi dengan melakukan mekanisme Bantuan Keuangan.



Gambar 1. . Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.

Sumber : pusdataru.jatengprov.go.id

Menurut data pada gambar di atas menunjukkan bahwa adanya pasokan air waduk dari tahun ke tahun memiliki pola yang hampir serupa yaitu debit tertinggi berkisar antara bulan Maret hingga bulan April dan debit terendah pada bulan Oktober sampai November. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan inovasi agar ketersediaan air embung dapat terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencukupi pasokan air dan memenuhi ketahanan pangan yaitu melalui program 1000 embung yang dirancang menggunakan prinsip panen hujan.

Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas infrastruktur desa untuk mencegah kekeringan dan pemenuhan pasokan air adalah pembangunan embung. Wilayah sebagai bahan penelitian pada penelitian ini yaitu Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Regulasi terkait dengan program ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Waduk atau Embung di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan ini mengaskan bahwa pengembangan atau pembangunan bendungan/waduk/ embung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang berdasar pada pola pengelolaan sumber daya air di lokasi perairan atau sungai yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Bahwa untuk menyimpan air yang berlebih ketika musim hujan untuk dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan air dan daya air ketika diperlukan dan dalam rangka pengendalian daya rusak air, diperlukan perencanaan pengembangan dan pembangunan waduk/embung di Jawa Tengah. Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali 5 tahun sekali yang berkaitan dengan bencana skala besar, perubahan regulasi, kebijakan nasional, dan strategi pemanfaatan ruang di wilayah provinsi.

Secara umum, menurut open data Kementrian (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) PUPR , embung merupakan bangunan konservasi air yang berbentuk cekungan untuk menampung air hujan dan air limpasan sebagai sumber mata air. Pembangunan embung dilakukan untuk mendukung kegiatan perkebunan, pertanian, dan peternakan terutama di wilayah desa saat musim kemarau. Embung juga dimanfaatkan sebagai sarana pengendali air untuk keperluan tertentu. Bukan hanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, embung juga digunakan untuk keseimbangan alam. Sebagai sumber penyediaan air untuk minum, suplesi irigasi di musim kemarau yaitu untuk tanaman palawija, hortikultura semusim, tanaman perkebunan semusim dan peternakan besar.

Pembangunan embung juga memiliki beberapa ketentuan diantaranya dibangun pada lahan berkapasitas mampu menahan peresapan air. Selain itu Embung juga dibangun pada areal pertanian yang bergelombang dengan kemiringan 8-30% agar memberi kemudahan pengairan dari permukaan ke area embung. Sedangkan untuk lahan pertanian, embung dibangun pada lahan yang lebih tinggi dengan kemiringan kurang dari 30%. Hal ini dilakukan untuk menghindari endapan tanah akibat erosi.

Sebagai mata pencaharian utama di desa, air merupakan sumber kehidupan bagi petani. Program pembangunan embung ini pertama kali digagas oleh Ganjar Pranowo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2015. Pembangunan tersebut didanai oleh APBD Jawa Tengah dan Dana Alokasi Khusus dan direalisasikan oleh BBWS, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah. Pada realitanya, satu-satunya aspek yang dapat meningkatkan perekonomian desa adalah pembangunan infrastruktur. Mereka telah memiliki potensi tetapi belum dapat mengolah dan mengalokasikan potensi tersebut. Lama proses pembangunan embung ini memerlukan waktu selama 3 bulan, yaitu dimulai pada bulan September sampai dengan bulan November 2021. Dalam hal ini tentunya pola kerja sama antar *stakeholders* sangat dibutuhkan sehingga terciptanya efektifitas *good governance* dalam pembangunan desa. Upaya ini juga sebagai inisiasi desa lain yang mengalami kekeringan dengan menciptakan energi terbarukan sekaligus mengubah pola perilaku masyarakat yang inovatif. Menurut keterangan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Semarang, desa tersebut berada di

kaki gunung merbabu dengan sumber airnya, namun belum memiliki jaringan irigasi yang mencukupi, serta tidak adanya kebutuhan air untuk peternakan besar.

Dalam proses kerja sama untuk mewujudkan inovasi tersebut, kelompok tani sebagai bentuk partisipasi masyarakat membentuk proposal untuk diajukan kepada Dinas Pertanian dan Perhutanan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan hubungan kelompok kepentingan dan perumus kebijakan. Pengaruh dari kelompok kepentingan terhadap sebuah perencanaan kebijakan yang akan diformulasikan oleh pemerintah, biasanya tergantung oleh beberapa faktor, seperti besar atau kecilnya jumlah kelompok, kekompakan dari anggota organisasi dalam advokasi kebijakan, serta kemampuan kelompok dalam melakukan lobi-lobi politik. Dana swadaya diberikan oleh pemerintah daerah setelah inovasi tersebut disetujui. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) melakukan pendampingan dalam proses pembangunan dan pengawasan embung Desa Manggihan. Sosialisasi pun turut diberikan untuk memaksimalkan kinerja inovasi tersebut. Embung ini, merupakan satu-satunya sumber air satu-satunya yang dibangun di desa tersebut. Tokoh-tokoh masyarakat, seperti Kepala Desa sangat mendukung program pembangunan embung ini. Selama proses implementasi kebijakan ini, kelompok tani bertanggung jawab dengan pembentukan laporan pertanggung jawaban kegiatan pembangunan embung di Desa Manggihan. Kelompok Tani yang terbentuk yaitu Kelompok Tani Utomo yang dibentuk melalui surat keputusan kepala Desa Manggihan. Selain itu masyarakat dan Kelompok Tani juga dilibatkan dalam proses rancangan pembangunan atau site plan mengenai

koordinat pembangunan, desain bangunan, serta rancangan anggaran dalam dana alokasi khusus.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pembuatan embung untuk meningkatkan kualitas infrastruktur air di Desa Manggihan Tahun 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pembuatan embung dalam meningkatkan meningkatkan kualitas infrastruktur air di Desa Manggihan Tahun 2021

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memenuhi beberapa aspek berikut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan secara umum pada pembangunan desa serta dapat dipergunakan untuk penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan program embung Manggihan yang dilaksanakan.
- b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi serta evaluasi terhadap upaya pemerintah dalam menjalankan program pemerintah di Indonesia dalam bidang pembangunan desa.

- c) Sebagai bentuk aspirasi, saran, dan masukan terhadap program pembangunan desa terkait kelemahan serta kelebihan kebijakan.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini ditujukan sebagai acuan pembandingan atas hasil yang ditemukan sehingga wawasan ilmiah yang ada dapat disempurnakan. Penelitian terdahulu ini juga bertujuan agar memudahkan penulis mencari problematika yang belum terangkat serta menghindari adanya kecurangan atau plagiarisme.

1. Novita Wijayanti, Hardi Warsono, Yuwanto, Teguh, Krismartini. Universitas Diponegoro, 2020.

Penelitian ini berjudul *Impact Evaluation in Banyumas District, Central Java*. Penelitian ini berusaha mengkaji dampak kebijakan pembangunan embung di Kabupaten Banyumas dengan membandingkan capaian sebelum dan sesudah dilaksanakan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus studi *comparative method*. Hasil penelitian ini diukur dengan data BPS yang berasal dari hasil PDB domestik Bruto. Dampak dari pembangunan Embung di Kabupaten Banyumas dalam bidang pertanian, hanya mampu menaikkan 1% PDRB dari tahun sebelumnya. Hal ini dinilai belum membantu pertumbuhan ekonomi. Perbedaan dari penelitian yang saya lakukan, penelitian ini berusaha mengevaluasi hambatan dan optimalisasi dari kebijakan pembangunan embung yang terfokus pada produktivitas pertanian di Kabupaten Banyumas. Dapat ditarik Kesimpulan bahwa dampak adanya program pembangunan

embung ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dampak peningkatannya memang cukup besar. Namun pada realitanya hasil presentase lahannya sangat kecil. Persamaan penelitian kami adalah pembahasan mengenai permasalahan air yaitu ketidaksesuaian distribusi air antara kebutuhan dan penyediaan tempat (parsial).

2. Wafirotul Jannah, Universitas Islam Kalijaga, Fakultas Dakwa dan Komunikasi, 2020.

Penelitian ini berjudul Embung dan Pemberdayaan Masyarakat, Studi Proses, Model, dan Dampak Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teori proses pemberdayaan masyarakat dan teori dampak dari adanya pemberdayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mode peran dalam pemberdayaan masyarakat oleh *multistakeholder* serta memberikan pemahaman mengenai dampak pembangunan embung ini terhadap masyarakat Dusun Tonogoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui program pembangunan embung di wilayah Tonogoro berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang meningkat melalui lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, serta peningkatan kualitas fisik lingkungan dan infrastruktur yang semakin memadai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangun embung ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peran “pentahelix” dan dapat memberikan perubahan fisik lingkungan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah kajian ini

lebih menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pembangunan embung dan dampaknya. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah adanya partisipasi masyarakat yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan ini.

3. Annisa Citra Muslimah, Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Budaya, 2018.

Penelitian ini berjudul Pembangunan Embung di Kabupaten Rembang dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Pertanian Tahun 1989-1999. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak, proses, serta faktor yang mempengaruhi pembangunan embung. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan kajian sejarah sosial ekonomi dengan teori implementasi dan pembangunan nasional. Hasil penelitian menunjukkan embung di Kabupaten Rembang meningkatkan kualitas infrastruktur dan berdampak positif dalam bidang pertanian yaitu irigasi sawah dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani dan masyarakat dengan memanfaatkan produksi varietas-varietas unggul. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan embung ini menjadi salah satu pintu masuk untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Rembang. Hal ini dikarenakan para petani dapat melakukan budidaya pertanian lebih maksimal dari segi intensitas serta kualitasnya. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini lebih pada permasalahan kekeringan di Kabupaten Rembang pada masa Bupati Wchidi Riyono yang berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian. Penelitian ini juga lebih membahas

analisis faktor yang mempengaruhi proses pembangunan. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah objek yang diteliti sama-sama embung dan membahas tentang dampak pembangunan embung bagi masyarakat terkhusus bidang pertanian.

4. Gabriel Emerald, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.

Penelitian ini berjudul Pengembangan Embung Bansari di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori pengembangan wisata dan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pihak pengelola pengembangan destinasi wisata Embung Bansari oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Temanggung. Penelitian ini, lebih terfokus pada pengembangan wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat temanggung serta melakukan sosialisasi koordinasi demi menjaga nilai, norma, dan budaya masyarakat Kabupaten Temanggung. Hasilnya terdapat beberapa upaya pengembangan yang dilakukan, yaitu upaya pengembangan awal, pembangunan fisik, dan operasionalisasi konsep menggunakan pilar-pilar pariwisata berkelanjutan oleh Dinas Kebudayaan. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah adanya partisipasi dari masyarakat untuk memaksimalkan program kebijakan yang berkelanjutan dalam pembangunan embung.

5. Ulvia Noer Uyunina, Universitas Brawijaya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penelitian ini berjudul Studi Tentang Program Pembangunan Seribu Embung di Kabupaten Bojonegoro Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program seribu embung bagi kesejahteraan masyarakat dengan teori implementasi dan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Program seribu embung memberikan manfaat kepada masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak lain yang dihasilkan yaitu ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan (meningkatkan produksi panen). Pembangunan seribu embung merupakan salah satu solusi yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, terdapat temuan bahwasannya program pembangunan embung hanyalah sekedar pembangunan secara teknis dan oinfrastruktur semata yang tdk dibarengi dengan konsepsi yang matang serta arah kebijakan dalam kedaulatan pangan yang diinginkan oleh Kabupaten Bojonegoro. Sehingga, adanya kebijakan seribu embung ini hanya capaian sebagai output belaka tanpa outcome yang semesttinya dalam konsep strategi pembangunan berkelanjutan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini memfokuskan pada program seribu embung oleh pemerintah.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu upaya yang dinamis dalam mencapai tujuan bersama melalui kebijakan yang dibuat. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses dalam pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan perilaku birokrat, masyarakat, ataupun pihak lain untuk mencapai kesejahteraan bersama. George C. Edwards III menyatakan model implementasi kebijakan publik yaitu *direct and indirect impact on Implementation*.

Perspektif tersebut memiliki empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yang terdiri dari (Agustino, 2017 : 150) :

a. Komunikasi

Yaitu tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang mengharuskan agar implementor memahami prosedur yang harus dijalankan serta tujuan dan target kebijakan harus ditransmisikan terhadap kelompok target sasaran (*target group*), sehingga dapat meminimalisir adanya distorsi dalam implementasi

Adapun indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu komunikasi yaitu transmisi. Transmisi berkaitan dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan dengan sikap yang baik agar suatu gagasan dapat tersampaikan. Terdapat beberapa fungsi komunikasi, diantaranya (Nurhadi, 2017: 5-6):

1) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses belajar yang dialami individu agar memperoleh ilmu, keterampilan, kebiasaan serta nilai dan norma sehingga dapat berpartisipasi dan beradaptasi dengan kelompok masyarakat.

2) Informasi

Informasi sebagai sebuah data yang telah diolah sehingga dapat disampaikan dengan baik oleh orang lain dan bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan. Pengumpulan, pemrosesan fakta, opini, fenomena, dan isu dibutuhkan dalam proses komunikasi agar terjadi kesepahaman.

3) Motivasi

Motivasi merupakan pertanyaan kompleks yang mendorong individu untuk meraih tujuan (*goal*) dalam setiap aspek kehidupan bernegara.

b. Sumber Daya

Walaupun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas, tetapi apabila implementor mengalami problematika kurangnya sumber daya dalam proses pelaksanaan, maka implementasi tidak dapat berjalan efektif. Sumber daya ini dapat berbentuk sumber daya manusia, seperti kompetensi pelaksana kebijakan dan sumber daya material. Terdapat 3 aspek sumber daya yaitu:

1) Aspek Sumber Daya Manusia

Hasibuan Malayu S.P. (2017: 10) mendefinisikan sumber daya manusia sebagai kombinasi antara daya pikir atau intelektual dengan daya fisik yang dimiliki oleh setiap individu. Daya fisik ini berupa kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh individu melalui usaha

2) Aspek anggaran

Anggaran merupakan suatu perencanaan periodik yang sistematis yang disusun berdasarkan tujuan atau rencana jangka waktu yang ada. Adapun ciri-ciri anggaran diantaranya (Rusdianto, 2006) dinyatakan dalam satuan moneter, jangka waktu paling cepat 1 tahun, adanya integritas manajemen, usulan rencana anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi, dan analisis terhadap penyimpangan yang dilakukan. Tujuan anggaran adalah untuk mempermudah sistem pengawasan serta memaksimalkan sumber dana dalam investasi.

3) Sarana Prasarana

Moenir (2010: 119) mendefinisikan sarana adalah keseluruhan jenis perlengkapan, alat, serta fasilitas yang berguna sebagai pendukung dalam kegiatan atau pekerjaan. Dalam implementasi kebijakan sarana dan prasarana dibutuhkan agar dalam proses sosialisasi maupun pelaksanaan tercapai efisiensi dan efektifitas.

c. Disposisi

Yaitu sifat atau karakter implementor, seperti kejujuran, integritas, komitmen, konsisten, dan sifat demokratis. Implementor yang memiliki

disposisi yang unggul, maka implementor dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan sasaran kebijakan yang telah dibuat.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi sebagai implementor kebijakan harus dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diputuskan secara politik melalui negosiasi dan komunikasi dengan baik. Terdapat dua karakteristik yang dapat mengembangkan kinerja struktur badan birokrasi untuk memaksimalkan kinerja dengan melakukan Standar *Operating Prosedures* (SOP) yang berguna dalam pengoptimalan waktu agar perencanaan berjalan dengan kompleks dan fragmentasi. Fragmentasi merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan suatu kebijakan kepada badan-badan yang bersangkutan.

1.7. Operasionalisasi Konsep

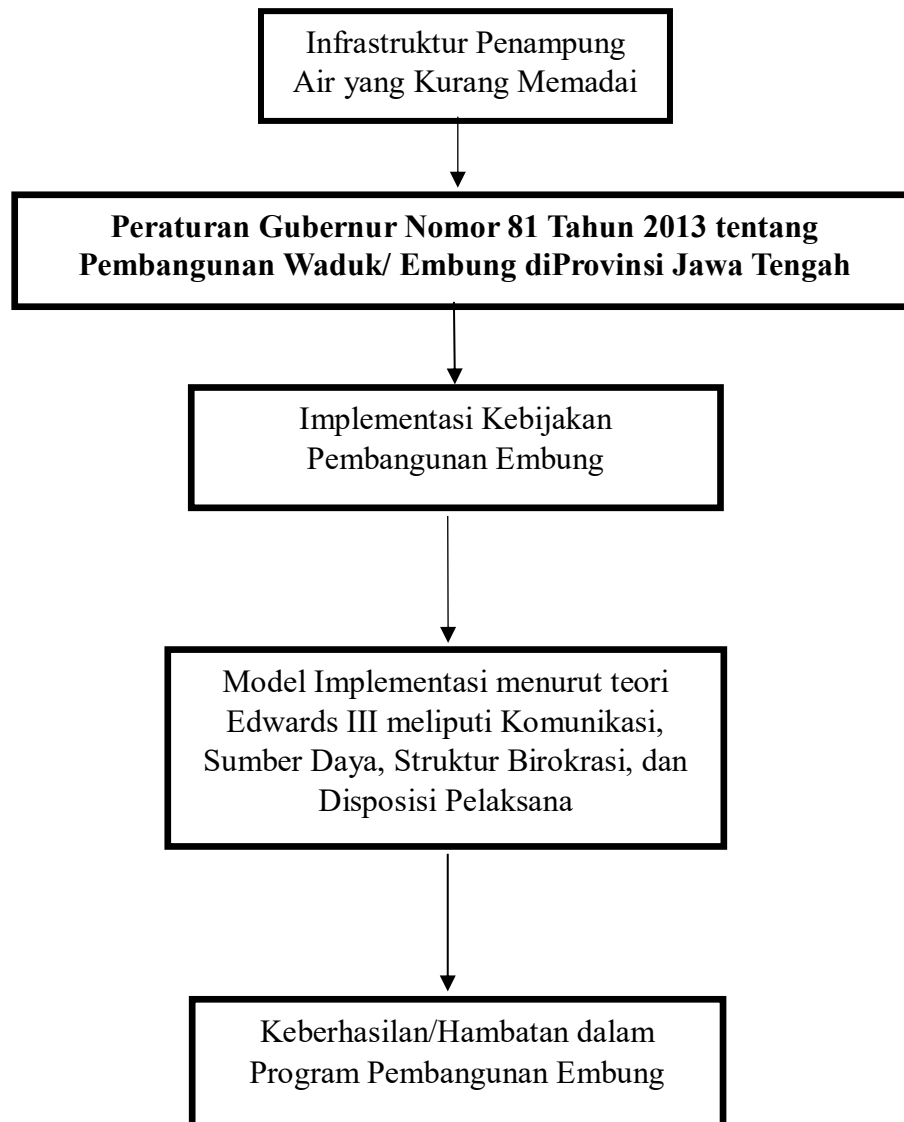
Tabel 3. Operasional Konsep

Variable	Indikator
Implementasi, yaitu upaya dinamis melalui proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah. Terdapat 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi	1. Komunikasi 1.1. Sosialisasi 1.2. Informasi 1.3. Motivasi adanya pembangunan Embung di Desa Manggihan.
	2. Sumber Daya 2.1. Sumber daya Manusia 2.2. Aspek Anggaran 2.3. Sarana Prasarana
	3. Disposisi 3.1. Integritas Implementor Kebijakan
	4. Struktur Birokrasi 4.1. <i>Standar Operating Prosedures</i> (SOP) dalam implementasi pembangunan embung di Desa Manggihan.

Operasionalisasi konsep menjadi acuan dalam penelitian yang mengacu pada teori implementasi George Edward III. Teori ini memiliki beberapa indikator dan sub indikator. Indikator pertama yaitu komunikasi yang memiliki sub indikator sosialisasi, informasi dan motivasi adanya pembangunan embung di Desa Manggihan. Kedua yaitu indikator sumber daya yang terdiri dari sub-indikator anggaran, pekerja dan sarana prasarana yang tersedia dalam pembangunan embung apakah sudah memadai atau belum. Ketiga, yaitu disposisi, terkait dengan pola perilaku implementor dalam proses pembangunan embung. Terakhir, yaitu Struktur

Birokrasi yang terkait dengan Standar Operating Prosedures sebagai jaminan aturan dalam pelaksanaan kebijakan.

1.8. Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Penulis (10 Februari 2024)

Peraturan Gubernur tersebut sebagai bentuk otonomi daerah atas pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengurus wilayah pemerintahannya sendiri. Dengan adanya regulasi tersebut akan mendorong

daerah agar mampu menyelesaikan permasalahan untuk menunjang kesesejahteraan dan keberjalanan pemerintahan. Salah satunya adalah dengan perbaikan infrastruktur daerah.

Salah satu upaya dalam mengatasi kekeringan di wilayah Kecamatan Manggihan adalah dengan pembangunan embung. Berkaitan dengan hal ini peran dari pemerintah dan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk hasil yang maksimal. Tujuan adanya embung tersebut adalah untuk mendorong ketahanan pangan dan sektor pertanian, perkebunan, serta peternakan. Mengacu pada teori George C. Edwards III adanya kesesuaian antara berbagai aspek.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan data analisis deskriptif berupa narasi ataupun lisan berdasarkan pengamatan atau penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini digunakan sebagai sarana memperoleh data penelitian dan sumber-sumber valid yang didapat dari wawancara maupun sumber-sumber yang relevan lain agar dalam penyusunan skripsi dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat memberikan manfaat. Metode ini bertujuan untuk menjabarkan segala “fenomena” yang tampak dan memaknai gejala-gejala (*noumena*) dibalikinya (Nursapia, 2020). Peneliti berusaha untuk memahami dan memberikan informasi yang merinci terhadap suatu

gejala atau fenomena dengan sangat dalam dan menginterpretasikan serta memberikan simpulan terhadap fenomena tersebut sesuai dengan konteksnya. Sehingga penelitian dapat mencapai suatu hasil yang objektif. Rancangan penelitian deskriptif analitic (*tick description*) dipilih sebagai kerangka dalam pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian dengan fokus penelitian terhadap studi Pembangunan Embung di Desa Manggihan..

1.9.2. Situs dan Informan Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Desa Manggihan merupakan desa yang rawan kekeringan karena belum memiliki jaringan irigasi yang layak. Subjek penelitian yang diambil adalah masyarakat dan kelompok tani untuk memperoleh informasi secara langsung demi kesempurnaan penelitian. Peneliti akan meminta informan terkait dengan data yang terkait dengan topik yang diangkat. Proses ini disebut *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan data oleh peneliti dengan menentukan target informan yang sesuai dengan penelitian (Turner, 2020). Teknik snowball sampling juga diterapkan dalam proses penelitian untuk menjangkau calon informan lain yang diharapkan dapat melengkapi data dari informan sebelumnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti telah memilih pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1.	Kepala Desa	Supriyadi	Kepala Desa Manggihan
2.	Kelompok Tani	Syarifudin	Ketua Kelompok Tani Budi Utomo
3.	Anggota Masyarakat	Gimin	Petani
4.	Anggota Masyarakat	Juari	Tokoh Masyarakat
5.	Koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan	Susiatik	Koordinator/PPL
6.	Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Gunawan S.P.	Pengawas

1.9.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian dikelompokkan menjadi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan berupa keterangan-keterangan dari pihak terkait. Berkaitan dengan ini, peneliti mengumpulkan data yang menyangkut dampak adanya pembangunan embung yang direalisasikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari kajian kepustakaan berupa jurnal, hasil penelitian terdahulu, laporan, dokumen ataupun buku-buku yang berguna sebagai pernyataan atau temuan pelengkap dalam penelitian.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi beberapa prosedur, yaitu :

- a. Observasi, yaitu strategi pengambilan data dengan pencatatan secara sistematis melalui pengamatan individu ataupun kelompok secara langsung. Dalam buku yang ditulis oleh Bahder Johan Nsution, observasi yang dimaksud yaitu mengamati segala perubahan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat kemudian melakukan evaluasi atas fenomena yang terjadi.
- b. *Interview* (Wawancara), merupakan metode pengambilan data dengan berinteraksi langsung dengan narasumber atau informan dengan dengan tanya jawab terkait topik yang dibahas. Pertanyaan sebaiknya telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Metode ini bertujuan agar peneliti sudah siap dengan bahasan yang akan disampaikan kepada informan
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang terait dengan topik penelitian berupa transkrip, catatan, surat kabar, prasasti, notulen rapat, foto, rekaman suara dan sebagainya. Dokumentasi sangat diperlukan untuk memperkuat argumen penelitian.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa :

- a. Verifikasi, yaitu pengecekan kembali validitas data yang telah diperoleh agar dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya
- b. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data penelitian atau hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu yang bertujuan sebagai pembandingan atas data-data lain yang telah dikumpulkan.
- c. Analisis, yaitu mekanisme berupa analisis problematika dari data-data yang telah dikumpulkan dengan menjelaskan secara sistematis dan jelas.
- d. Kesimpulan, yaitu tahapan terakhir untuk mendapatkan jawaban melalui penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan gambaran secara ringkas, dan mudah dipahami mengenai topik penelitian.

1.9.7. Kualitas Data

Validitas hasil penelitian dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu kualitas data dan ketepatan metode penelitian.utama (2016), menyatakan bahwa validasi data dalam desain penelitian berarti sebuah keadbsahan daripada kecocokan dengan penjabaran ilmiah dalam fenomena realitas yang ada. Validasi ini mengacu pada hal yang terbukti benar atau proposisi yang dari penelitian yang dilakukan. Hal ini berarti harus ada kesesuaian daei sumber informasi terhadap hasil penelitian yang dijabarkan.

Dalam penelitian ini. Teknik triangulasi dipilih sebagai metode untuk meninjau Kembali validitas data. Triangulasi data (triangulate) adalah sebuah teknik untuk memeriksa kembali data-data atau informasi yang telah diperoleh agar terbukti kebenarannya. Pengecekan tersebut dapat dilakukan melalui *crosscheck* dari sumber atau informan lain. Prosedur yang dilakukan penulis untuk melakukan triangulasi data dalam penelitian ini meliputi :

1. Melakukan validasi atas sumber-sumber lain melalui dokumen, literatur, ataupun narasumber lain.
2. Melakukan *in-dept interview* kepada narasumber
3. Melakukan uji silang data terhadap data narasumber dan realitas yang ada di lapangan.